



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARJONO ABADI
2. Jabatan : HAKIM AD-HOC
3. NHK : 869253

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.795.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/50 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 192 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 491.900.000

1. MOTOR, SUZUKI BEBEK Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000
3. LAINNYA, XQL LASER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.060.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.360.900.000

III. HUTANG Rp. 176.250.000

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.184.650.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.